



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I L A M P U N G

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
Nomor: 4/KU.01.00/LA/01/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 1/KU.01.00/LA/01/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya tertib pengelolaan anggaran dan tertib waktu pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a** tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran serta agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan perlu ditetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7f1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
23. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 162/KU.01.00/K1/08/2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Delapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
24. Surat Permohonan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Nomor 1/KP.04.00/LA-05/01/2026 tentang Permohonan Usulan BPP, Operator Keuangan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Tanggal 02 Januari 2026;
25. Surat Permohonan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1/KU.01.00/LA-02/01/2026 tentang Permohonan Pergantian Staf Pengelola Keuangan /Operator Tanggal 05 Januari 2026;
26. Surat Permohonan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3/KU.01/LA-12/01/2026 tentang Permohonan Pergantian Operator Sakti Tanggal 05 Januari 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686264/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 1/KU.01.00/LA/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT :** Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 1/KU.01.00/LA/01/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, tanggal 05 Januari 2026 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 6 Januari 2026

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :
- 1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
 - 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
 - 4. Pejabat /Staf yang bersangkutan.

Lampiran I: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M NIP. 19801003 200604 1 008	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008**

Lampiran II: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Andi Trisandi, S.E. NIP. 19821031 201503 1 002	Pengadministrasi Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
2.	Lukito Hadi Sumarto, S.A.P NIP. 19720109 200906 1 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
3.	Aria Alfariza, S.I.P., M.M NIP. 19790603 200701 1 011	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
4.	Hendi Pratama, S.M. NIP. 199112182019021001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
5.	Angkondo Islami, S.STP., M.M NIP. 19920515 201507 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
6.	Ns. G. Satria Pramantara, S.Tr.Kep NIP. 19950428 202203 1 006	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
7.	Alvindra, S.IP., M.IP NIP. 19900821 201502 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
8.	Andre Al Rendra, S.Pi NIP. 19790308 201001 1 010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
9.	Khoirul Anam, S.STP NIP. 19870724 200602 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
10.	Kukuh Julian, S.STP NIP. 19930718 201507 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
11.	Yulisti Indra Liana, S.Sos NIP. 19780717 201001 2 006	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

Lampiran III: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tirania Dewi Pramarsela, S.Si. NIP. 19970403 202203 2 001	Staf Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

Lampiran IV: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rifda Lutfiana Andini, A.Md.Ak NIP. 20000603 202201 2 004	Pranata Keuangan APBN Terampil Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

Lampiran V: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGELOLA DANA APBN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ipuk Warastuti NIP. 19790430 201407 2 001	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
2.	Muhtadin, S.IP NIP. 19760403 200701 1 003	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
3.	Panji Asmara, S.Pd.I NIP. 19880102 201101 1 004	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
4.	M. Ricky Alfandra, S.E. NIP. 19930216 202012 1 008	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
5.	Noviana Eka Indrawati, S.E NIP. 19791119 200701 2 002	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
6.	Syepriadi, A.Md NIP. 19930320 202203 1 009	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
7.	Otong Syahbana, S.E., M.M NIP. 19780621 200801 1 006	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
8.	Budianto NIP. 19740727 200903 1 002	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
9.	Zulkifli NIP. 19781108 200701 1 003	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
10.	Aan Setiawan NIP. 19870427 200604 1 004	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
11.	M. Fadhil Yanuar, S.Si NIP. 19970110 202203 1 001	Staf PNS Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
12.	Jamil, S.Pd.I NIP. 19900412 201902 1 004	Staf PNS Non Organik Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
13	Rosdiana, S.I.Pust. NIP. 19891223 201902 2 002	Penata Layanan Operasional Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

Lampiran VI: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGELOLA DANA APBN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Adam Samadzar, S.Kom NIP. 19940415 202321 1 017	Pranata Komputer Pertama Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
2.	Amelia Puspitasari, S.H NIP. 19850808 202421 2 019	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
3.	Okgi Fernanda, A.Md NIP. 19911015 202421 1 019	Pranata Komputer Pelaksana Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
4.	Dimasaka Nur Permono, A.Md.Ak. NIP. 20000925 202201 1 001	Pranata Keuangan APBN Terampil Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
5.	Kusumastuti Dwi Sedyo Sumarto	Pelaksana Pendukung Non PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
6.	Nuryanti, S.P NIP. 19900701 202521 2 020	Perencana Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
7.	Yuliana Herga, S.E NIP. 19980707 202505 2 005	Analisis Pengelola Keuangan APBN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
8.	Muhammad Ilhan Arraffi, A.Md.M NIP. 20020827 202505 1 002	Pranata Keuangan APBN Terampil Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
9.	Wati Rahayu, S.Pd. NIP. 19910119 202521 2 021	Perencana Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
10.	Alicia Wido Belinda, S.Tr. Ak. NIP. 20000601 202505 2 004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
11.	Yusma Annisa, S.E NIP. 19970420 202321 2 022	Perencana Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
12.	Dina Rismawati S.M NIP. 20000911 202505 2 003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
13.	Raddyar Eldwardo, S.E NIP. 19971008 202505 1 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
14.	Ali Try Satria, S.Kom. NIP. 19921002 202521 1 028	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
15.	Ratu Indhira Chumaiiroh Ansori, A.Md. NIP. 19950511 202521 2 034	Arsiparis Terampil Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
16.	Fajar Hidayat, S.Kom NIP. 19880213 202321 1 022	Pranata Komputer Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
17.	Dewi Sulistiyani, S.AP NIP. 19910211 202321 2 037	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
18	Beng Lazuardi Noor NIP. 19920506 202521 1 034	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

Lampiran VII: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Adelina Puteri Yudha, A.Md NIP. 19930525 201503 2 001	Staf Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
2.	Galih Radityo Utomo, S.Ds. NIP. 19880402 202521 1 028	Staf Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008

Lampiran VIII: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Lampung tentang Penunjukan Pejabat dan Staf
Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2026
Nomor : 4/KU.01.00/LA/01/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

**PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Adelina Puteri Yudha, A.Md NIP. 19930525 201503 2 001	Staf Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M
NIP. 19801003 200604 1 008